

Pengembangan Pengelola Konten Website www.nakertrans.go.id

Yuslam¹, Arif Jatmiko², Siti Umi Salamah³,
I Wayan S. Wicaksana⁴, Djuharsa⁵
^{1,2,3}Univ. Gunadarma & Depnakertrans,
⁴Univ. Gunadarma, ⁵Depnakertrans
^{1,2,3,5}{yuslam, arif, umi_s, djuharsa}@nakertrans.go.id,
⁴iwayan@staff.gunadarma.ac.id

Ringkasan

Website www.nakertrans.go.id merupakan situs resmi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berisikan data dan informasi mengenai ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Sampai dengan saat ini belum ada pengelola secara khusus yang menangani konten/isi website, sehingga mempengaruhi kinerja Depnakertrans dalam memberikan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat. Pada paper ini kami merancang sebuah pengembangan pengelola untuk website depnakertrans sesuai dengan tujuan dan kondisi yang ada.

Kata kunci : konten, pengembangan, pengelola, website

1 Pendahuluan

Website resmi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi <http://www.nakertrans.go.id> hadir pada tahun 2001 bersamaan dengan berga-

bungnya Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Transmigrasi, yang berisi data dan informasi mengenai ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Selama kurun waktu kurang lebih 6 (enam) tahun, pengelolaan website masih berada sepenuhnya pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi (Balitfo), padahal pengelolaan website seharusnya melibatkan seluruh unit kerja yang ada di Depnakertrans.

Berbagai kendala yang dihadapi meliputi:

1. Unit kerja di luar Balitfo tidak merasa memiliki website
2. Belum adanya regulasi bagi pengelolaan website www.nakertrans.go.id
3. Belum ada personil yang ditunjuk sebagai wakil dari tiap unit eselon I yang duduk bersama sebagai pengelola website hal tersebut berdampak pada kualitas dan kontinuitas konten website.

Paper ini akan mengulas pengembangan pengelola konten website

www.nakertrans.go.id dengan tujuan agar website mempunyai pengelola konten yang secara rutin mengelola website www.nakertrans.go.id sehingga menjadi media interaktif yang selalu terjaga keterkiniannya dan terdepan serta "one stop services" dalam pelayanan data dan informasi di bidang Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian.

Paper ini terdiri dari empat bagian yang meliputi bagian satu yang merupakan latar belakang, yang kemudian diikuti tentang pengelolaan website di bagian kedua. Bagian ketiga adalah hasil dari evaluasi dan bahasan, yang ditutup dengan bagian keempat.

2 Pengelolaan Website

Secara global, sebuah website merupakan suatu sistem informasi, dimana terdapat 5 (lima) komponen yang terdapat di dalamnya, yaitu [5]:

1. Hardware atau perangkat keras
2. Software atau perangkat lunak
3. Sumber Daya Manusia
4. Data/Informasi
5. Networking dan infrastruktur

Dari 5 (lima) komponen di atas, tulisan kali ini lebih banyak mengulas mengenai sumber daya manusia dalam kaitan dengan data/informasi. Meskipun demikian ketiga aspek lainnya tidak boleh diabaikan karena menyangkut dukungan keamanan, kecepatan akses serta keragaman fasilitas yang ditampilkan.

Sumber daya manusia dan data/informasi saling berkaitan erat, karena pengelola website adalah sumberdaya manusia.

Seperti tertuang dalam Instruksi Presiden no. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, salah satu kerangka arsitektur e-government adalah organisasi pendukung (back office) yang bertugas mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik[2].

Selain itu dalam pengelolaan website diperlukan pilar berupa legalitas / peraturan pelaksanaan yang komprehensif sebagai dasar pelaksanaan setiap unit/institusi yang ada di Depnakertrans. Untuk itu, legalitas, baik berupa Kepmen, panduan, Juklak/Juknis dimaksud perlu segera disusun serta dipublikasikan kepada setiap pelaksana yang terlibat agar tercipta koordinasi dan pemahaman yang sama dalam operasionalisasi website. Pilar regulasi perlu mencakup beberapa aspek yang mengedepankan aspek Rencana Strategi (renstra) sebagai upaya mendapatkan justifikasi program dan anggaran yang berkesinambungan.[1]

3 Hasil Evaluasi dan Bahasan

1. Regulasi

Tugas dan fungsi Badan Penelitian seperti tersebut dalam Permen No. PER.05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak menyebutkan secara jelas keberadaan pengelola website di dalamnya, namun secara implisit hal ini sudah tertuang dalam Pasal 816, yaitu : melakukan fungsi koordinasi dan ker-

jasama penelitian dan pengembangan, pengelolaan serta pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.[4]

Untuk lebih mengikat kepada semua pihak agar merasa memiliki dan mengelola website secara bersama-sama, perlu segera disusun payung hukum, minimal dalam bentuk peraturan menteri, yang mengatur pengelolaan website, dimulai dari pengaturan konten sampai dengan pengelolanya.

2. Pengaturan Konten

Pengaturan konten mencakup beberapa aspek, diantaranya adalah updating/pembaharuan konten. Perlu diklasifikasikan konten mana dengan aturan berapa lama bisa ditayangkan serta berapa lama sudah harus diperbaharui. Keragaman konten mengenai ketenagakerjaan dan ketransmigrasian bukan mustahil menghasilkan duplikasi data. Pengaturan konten sangat dibutuhkan untuk meminimalisasi hal tersebut.

Konten semestinya dikelola dengan baik, memiliki segmen, target dan posisi yang jelas, sehingga otomatis website pemerintah akan terdiferensiasi sendiri. Diferensiasi akan menghindari duplikasi (kesamaan) informasi dengan website yang lain. Informasi yang unik dan spesifik akan menjadikan satu alasan yang kuat bagi user untuk datang dan mendapatkan data dan informasi yang mereka butuhkan.:[6]

Website nakertrans merupakan website penyedia data dan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, se-

hingga jangan sampai gambaran yang melekat itu hilang karena data dan informasi yang ditampilkan bukan sesuatu yang menjadi kebutuhan masyarakat. :[7] Berdasarkan monitoring kunjungan pengunjung website, informasi yang banyak diminati adalah peraturan perundangan dan hubungan industrial, maka konten mengenai kedua hal tersebut sedapat mungkin digali dan ditampilkan lebih banyak lagi.

Pada perencanaan pengembangan, pada jangka pendek ke depan dalam dua sampai dengan lima tahun Diharapkan ada penanggung jawab yang menangani tiga pilar utama dalam sebuah proses informasi yang meliputi input, proses dan output.

Pilar input adalah menangani berbagai hal seperti sumber data dari mana saja. Menjaga kelengkapan, ketepatan dan keakuratan data dalam proses penginputan. Disini terutama mengingat sumber data sangat beragam, ada dari lingkungan pemerintah, seperti Pemd, BPS, Diknas. Dari luar instansi pemerintah seperti Perusahaan Pengelola Tenaga Kerja baik level skill rendah maupun ke atasnya, lembaga-lembaga pelatihan, bursa-bursa kerja swasta. Permasalahan lain dalam pengumpulan data setiap sumber data memiliki keragaman informasi yang sangat tinggi. Keragaman ini dapat dalam arti representasi ataupun pemeliharaan datanya.

Khusus untuk representasi data, setiap sumber dapat memiliki keragaman dalam hal *syntactic, strucutred dan semantic*. Dimana keragaman sytactic

adalah keragaman dalam definisi data dasar, seperti nama attribute atau field, atau jenis tipe data seperti text atau numerik. Sementara keragaman structured lebih melihat keragaman akan sebuah attribute dalam pengelompokan atau taksonomi struktur informasi. Seperti attribute *pondasi* dalam rumpun struktur arsitektur ini dimaksud adalah pondasi fisik dari bangunan, dalam rumpun struktur pendidikan, ini adalah latar belakang pendidikan. Untuk keragaman semantic, ini adalah keragaman dari model bahasa, dimana sebuah kata yang sama dapat memiliki arti yang berbeda, atau dua kata yang berbeda memiliki arti yang sama. Permasalahan utama pada semantic adalah bagaimana mengukur tingkat kesamaan sebuah kata atau konsep secara kuantitatif bukan kualitatif.

Permasalah keragaman di atas, jika dilakukan input secara manual tidak terlalu masalah besar, karena manusia dapat melakukan. Tapi kalau mau dilakukan secara otomatis dengan komputer, ini memerlukan sebuah pendekatan khusus.

Pada proses, perlu diperhatikan beberapa masalah seperti proses pengolahan data, unjuk kerja dalam menhandel sebuah query, keamanan data, backup rutin data. Pada output, yang perlu diperhatikan adalah pemilahan jenis output sesuai dengan target pengguna. Hal lain yang kerap kali tidak menjadi perhatian adalah perlunya fungsi public relation untuk menginformasikan ke masyarakat tentang tersedianya

data atau informasi atau aplikasi yang berguna dari sebuah website.

3. Organisasi Pengelola Website

Pada saat ini belum ada organisasi pengelola website nakertrans, tanggung jawab pengoperasian website hanya berada pada 2 (orang) admin website dan 2 (dua) orang dari pusat data dan informasi. Menilik aturan yang dikeluarkan oleh Depkominfo, pengelolaan website (daerah) seyogyanya mempunyai organisasi pengelola yang terdiri dari :[3]

- Pelindung (Gubernur/Bupati/Walikota)
- Penanggungjawab Situs Web Pemerintah Daerah (eselon tertinggi pada organisasi struktural Pemerintahan Daerah)
- Manajer Situs (eselon satu tingkat dibawah eselon tertinggi pada organisasi struktural Pemerintahan Daerah)
- Tim Pengelola (sejumlah pegawai Pemerintah Daerah yang mampu, serta mempunyai standar kompetensi di bidang teknologi informasi). Melakukan tugas operasional situs web, pemantauan dan pemeliharaan standar-standar situs web, terutama tanggungjawab pemasukan informasi yang tersebar luas di dalam organisasi pemerintah daerah.
- Tim Asistensi (para eselon satu tingkat dibawah eselon tertinggi pada organisasi struktural pemerintah daerah, mewakili unit-unit kedinasan yang ada di daerah).

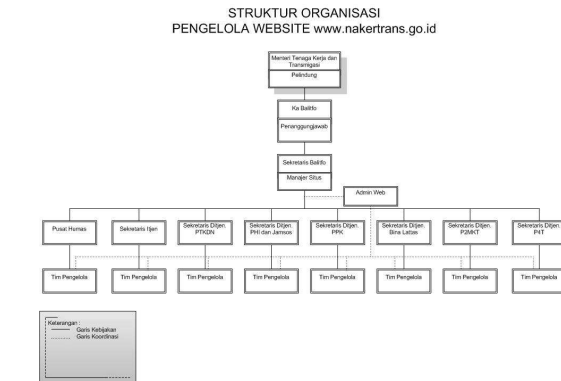
Sejalan dengan hal tersebut di atas, pengelola website pemerintah pusat pun seharusnya mempunyai struktur organisasi tersendiri. Khusus Depnakertrans, pengelola konten website harus terdiri dari wakil-wakil unit eselon I yang ada, sehingga data dan informasi yang ditampilkan lebih beragam dan mewakili tugas dan fungsi masing-masing eselon I, dimana Badan Penelitian Pengembangan dan Informasi menjadi koordinator dan pengelola sistemnya. Usulan Struktur Organisasi Pengelola Website seperti pada gambar 1.

Rancangan pengelola website nakertrans ini adalah untuk jangka pendek dengan memperhatikan kebutuhan, ketersediaan sumber daya manusia, tujuan dari penyediaan website dan juga kepada kaidah umum serta perkembangan teknologi. Bentuk, pembagian tugas dan sistem operasional prosedur perlu dikembangkan secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan.

4 Penutup

Berdasarkan tinjauan pustaka serta hasil pembahasan, untuk mengembangkan pengelolaan website www.nakertrans.go.id, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Membuat regulasi/peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan website
2. Membentuk pengelola website, yang merupakan tindak lanjut dari peraturan perundangan yang telah ditetapkan



Gambar 1: Struktur Organisasi Pengelola Website

terlebih dahulu, sehingga semua pihak yang ditunjuk untuk mengelola website dapat melaksanakan tugas secara profesional untuk melayani masyarakat dalam hal penyediaan data dan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

3. Perlunya dipikirkan pemberian penghargaan dan teguran (reward and punishment) kepada pengelola website di masing-masing unit kerja sesuai dengan kinerja mereka.

Pustaka

- [1] Anto Pribadi. Bursa transmigrasi on line kenapa tidak. <http://www.nakertrans.go.id/newsdetil>, 10 2004.
- [2] Depkominfo. Instruksi presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government, 2003.

- [3] Depkominfo. Panduan pengelolaan situs web pemerintah daerah. <http://www.depkominfo.go.id>, 2006. Accessed Oct 23, 2007.
- [4] Depnakertrans. Peraturan menakertrans nomor: 05/men/iv/2007 tentang organisasi dan tata kerja depnakertrans. <http://www.nakertrans.go.id>, 07 2007.
- [5] Obrey. Information technology. handout, 2007. bahan kuliah Pengantar Manajemen Sistem Informasi.
- [6] Suparjo. One stop shopping, arsitektur website pemerintah yang ideal. <http://www.perbendaharaan.go.id/modul/pustaka/index.php?id=15>, 2006. accessed Nov 6, 2007.
- [7] Tohir. Kota-kota terkaya: Melongok cara mereka memanfaatkan. *Warta Ekonomi*, (25), 2005. Accessed Nov 6, 2007, <http://gerbang.jabar.go.id/kotabandung/index.php?index=15&idartikel=34>.